

RELEVANSI PIDATO PENGANGKATAN KHALIFAH ABU BAKAR TERHADAP POLITIK DAKWAH KONTEMPORER

Sarbini Anim¹, Mastori², Zenal Arifin³, Moh. Sitoh Anang⁴

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta^{1,2}, IPRIJA Jakarta³, STAI PTDII, Jakarta⁴

mastori.fai@uia.ac.id

Received: 11-02-2026 | Revised: 03-04-2026 | Published: 03-07-2026

Abstract: The decline in public trust in leadership in Indonesia indicates a crisis of leadership ethics. This issue calls for a reconstruction of the leadership paradigm grounded in moral values and a strong Islamic ideology. In Islamic history, the speech marking the appointment of Abu Bakr al-Siddiq as the first caliph serves as a key reference containing the fundamental principles of leadership based on ethics and theology. This study aims to examine the Islamic leadership paradigm in that speech, focusing on its ethical, theological, and socio-political dimensions, as well as its relevance to contemporary leadership. The method employed is a qualitative approach through a literature review, utilising primary sources from classical Islamic historical literature and hadith, as well as secondary sources comprising academic books and journals. Data analysis was conducted through discourse analysis, comprising the stages of reduction, thematic categorisation, and conceptual interpretation. The research findings indicate that the speech affirms the concept of leadership based on moral-transcendental legitimacy, namely accountability to Allah as the supreme authority. Furthermore, there is the principle of conditional obedience, the duty of amar ma'ruf nahi munkar, and openness to criticism as a form of accountability. Abu Bakr's leadership has also proven effective in maintaining stability during times of crisis through firmness and consistency with prophetic values. These principles are relevant as solutions to the modern leadership crisis in Indonesia.

Keywords: *Abu Bakar, Islamic leadership, leadership ethics, inaugural address, Indonesia*

Abstrak: Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di Indonesia menunjukkan adanya krisis etika kepemimpinan. Persoalan ini menuntut rekonstruksi paradigma kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan ideologi Islam yang kuat. Dalam sejarah Islam, pidato pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama menjadi rujukan penting yang memuat prinsip dasar kepemimpinan berbasis etika dan teologi. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma kepemimpinan Islam dalam pidato tersebut dengan fokus pada dimensi etis, teologis, dan sosio-politik serta relevansinya bagi kepemimpinan kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan sumber primer dari literatur sejarah Islam klasik dan hadis, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal akademik. Analisis data dilakukan melalui analisis wacana dengan tahapan reduksi, kategorisasi tematik, dan interpretasi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut menegaskan konsep kepemimpinan berbasis legitimasi moral-transendental, yakni pertanggungjawaban kepada Allah sebagai otoritas tertinggi. Selain itu, terdapat prinsip ketaatan bersyarat, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, serta keterbukaan terhadap kritik sebagai bentuk akuntabilitas. Kepemimpinan Abu Bakar juga terbukti efektif dalam menjaga stabilitas pada masa krisis melalui ketegasan dan konsistensi terhadap nilai kenabian. Prinsip-prinsip ini relevan sebagai solusi atas krisis kepemimpinan modern di Indonesia.

Kata kunci: *Abu Bakar, Kepemimpinan Islam, Etika Kepemimpinan, Pidato Pengangkatan, Indonesia*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Krisis kepemimpinan yang terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik, merajalelanya korupsi dan lemahnya integritas pemimpin telah menjadi fenomena global, termasuk Indonesia. Terkait korupsi, sekalipun berbagai upaya telah dilakukan nyatanya korupsi masih merajalela.¹ Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan model kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai etika dan spiritual serta ideologi Islam yang komprehensif menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai amanat yang menuntut tanggung jawab moral dan transendental. Oleh karena itu, paradigma untuk mencari kepemimpinan alternatif berdasarkan nilai-nilai normatif merupakan suatu kebutuhan dalam mengatasi masalah-masalah ini. Titik urgensi kepemimpinan terletak pada kenyataan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat.²

Dalam khazanah Islam, salah satu rujukan penting bagi model kepemimpinan berbasis nilai adalah pidato pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Peristiwa ini menjadi momen krusial yang menentukan arah politik pemerintahan umat Islam pada fase awal kekhalifahan dan mencerminkan dimensi dakwah yang kaya secara strategis dan komunikatif. Secara substantif, pidato pengangkatan Abu Bakar mengandung muatan nilai teologis, etis, dan politik yang mendasar.³ Karena itu, kajian terhadap pidato Abu Bakar perlu dielaborasi secara kontekstual dalam kerangka menghadapi tantangan kepemimpinan modern, khususnya dalam konteks politik dakwah.

¹ Puji Astuti, *Politik Korupsi: Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 2013.

² Maimunah Maimunah, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya," *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* 5, No. 1 (2017).

³ Muhammad Taufiqul Hidayat, Zhalfa Luthfi Fauza, dan Bahaking Rama, "Proses Peralihan Kepemimpinan Dari Nabi Ke Khalifa Abu Bakar As-Siddiq," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (Desember 2024): 162–68, <https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6397>.

Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengkaji kembali pidato Abu Bakar bukan sekadar sebagai artefak sejarah, tetapi sebagai teks normatif yang memiliki relevansi dengan praktik politik dakwah kontemporer. Politik dakwah, dalam hal ini, tidak dipahami sebagai perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik. Sebab kepemimpinan dalam perspektif dakwah meniscayakan adanya integrasi antara otoritas politik dan tanggung jawab moral-spiritual, sebagaimana tercermin dalam pidato Abu Bakar.

Selanjutnya, untuk memperjelas fokus kajian, penelitian ini menempatkan pidato pengangkatan Abu Bakar sebagai objek analisis utama dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang relevan dengan politik dakwah kontemporer. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk menjembatani antara warisan normatif Islam klasik dengan realitas praksis kepemimpinan modern. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan isi pidato, tetapi juga mengonstruksi relevansinya dalam menjawab krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa studi terhadap pidato Abu Bakar memiliki signifikansi akademik dan praktis, terutama dalam merumuskan paradigma kepemimpinan Islam yang berorientasi pada nilai, akuntabilitas, dan transformasi sosial. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam pidato tersebut dapat direkonstruksi sebagai landasan konseptual bagi politik dakwah kontemporer, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan. Sebagai contoh, bagaimana integritas kepemimpinan dibangun adalah pidato beliau yang mengisyaratkan bahwa tidak adanya klaim superioritas pribadi tetapi menegaskan: “Jika saya bertindak benar, bantulah; jika salah, luruskanlah saya...”⁴ dan bahwa ketaatan kepada khalifah hanya berlaku selama ia berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul saw.

⁴Bimby Habibi Patmawati, “Strategi Dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq,” *J-MD Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (Juni 2023): 27–44, <https://doi.org/10.24260/j-md.v4i1.1514>.

Secara konseptual, pidato pengangkatan Abu Bakar menggambarkan gagasan dasar tentang kepemimpinan dan dakwah sebagai dua dimensi yang terintegrasi dalam sufistik Islam. Bagi beliau, kepemimpinan bukan sekadar administrasi kekuasaan, tetapi juga dakwah moral kepada umat.⁵ Mengenai hal ini, para peneliti kontemporer memandang pidato Abu Bakar sebagai wacana retorik yang kaya akan strategi persuasi dakwah dan prinsip etika politik. Sebuah studi linguistik dan wacana kritis menunjukkan bahwa pidato ini sarat implikasi ideologis yang menekankan keadilan, kesetaraan, kerendahan hati, dan pertanggungjawaban pemimpin sebagai prinsip utama kepemimpinan dalam Islam.

Lebih jauh, studi analitis retorika terhadap pidato pengangkatan beliau menemukan bahwa penggunaan Al-Qur'an dan ajaran Nabi saw dalam struktur pidato Abu Bakar bukan hanya memperkuat legitimasi politiknya, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dakwah yang efektif melalui intertekstualitas dan penekanan nilai-nilai universal, seperti kejujuran, kehormatan, dan perhatian terhadap yang lemah.

Dalam kajian dakwah dan komunikasi Islam kontemporer, relevansi pidato ini masih menjadi bahan diskusi yang substantif. Dalam konteks dakwah politik modern, sejumlah peneliti menyoroti bahwa pidato Abu Bakar pada dasarnya adalah contoh awal dari dakwah politik yang sukses.⁶ Dakwah politik di sini dimaknai sebagai tindakan komunikasi strategis yang bertujuan mempengaruhi struktur politik masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai etika Islam ke dalam basis praksis kekuasaan.

Selain itu, konteks sejarah pengangkatan Abu Bakar juga penting untuk dipahami secara struktural terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan konflik perebutan otoritas di masyarakat Madinah. Fenomena inilah yang memaksa Abu Bakar untuk menggunakan pidatonya sebagai sarana rekonsiliasi dan konsolidasi sosial guna mencegah perpecahan dan mempertahankan kesatuan umat yang baru.

⁵ Siti Nur Azizah dan Ari Wirasusanto, "Leadership dalam Perspektif Dakwah," *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 3, no. 3 (Desember 2024), <https://doi.org/10.29300/istisyfa.v3i3.6366>.

⁶ Friska Syahidatul Fatikhah, "Komunikasi Persuasi Dakwah dalam Pidato Abu Bakar pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Januari 2024): 1–22, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkipi.v2i1.19>.

Karena menariknya pesan-pesan Abu Bakar dalam pidato pada awal kepemimpinannya itu menyebabkan banyak para peneliti yang tertarik untuk mengkaji Abu Bakar sebagai sosok khalifah pertama dari berbagai perspektif keilmuan. Namun demikian, relevansinya terhadap politik dakwah kontemporer masih relatif terbatas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasnani Siri yang membahas fungsi kekhalifahan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam menjalankan roda kepemimpinan.⁷ Dibahas juga tentang kebijakan-kebijakan utama pemerintahan Abu Bakar dalam memerangi orang-orang murtad, Nabi Palsu dan penolak pembayar zakat. Dengan demikian, fokus penelitian Siri adalah fungsi dan kebijakan Abu Bakar sebagai Khalifah tanpa mengaitkannya secara khusus dengan nilai-nilai etika politik dalam pidato Abu Bakar yang pertama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulandari, dkk berjudul berjudul ‘analisis komparatif kebijakan Fiskal pada Masa Abu Bakar Shidiq dan Umar bin Khatab’.⁸ Peneliti tersebut berfokus pada kajian tentang persamaan dan perbedaan kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab. Sebaliknya, penelitian yang terbit di jurnal Manarul Ilmi ini tidak berfokus pada komunikasi atau pidato Abu Bakar.

Ketiga, penelitian berjudul ‘*Abu Bakar As-Shiddiq’s Inauguration Speech: The Principles and Basics of His Leadership at the Time of Rashidun Caliphate*’.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq dalam pidatonya pada pelantikannya. Sekalipun sama-sama meneliti tentang Pidato Abu Bakar namun penelitian tersebut tidak secara spesifik

⁷ Hasnani Siri, “Abu Bakar: Fungsi kekhalifahan dan kebijaksanaannya memerangi kaum murtad,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 170–83.

⁸ Siti Khadijah dan Jasmin Juwandari Putri, “Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq Dan Umar Bin Khattab,” *Manarul Ilmi: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (2025): 13–30.

⁹ Mulawarman Mulawarman, “Pidato Pertama Abu Bakar Di Depan Kaum Anshar (Studi Analisis Retorika dan Gaya Bahasa),” *BIDAR: Jurnal Ilmiah Kebahasan & Kesastraan* 10, no. 2 (2020): 27–36.

mengaitkannya dengan etika kepemimpinan, terutama kaitannya dengan problem kepemimpinan saat ini di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pribadi Abu Bakar dan proses terpilihnya sebagai khalifah pertama dan bagaimana nilai-nilai etika dan komunikasi politik dakwah yang terkandung dalam pidato Abu Bakar? Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yakni menganalisis secara mendalam pribadi Abu Bakar Ash-Shiddiq serta proses terpilihnya sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam; mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai etika serta komunikasi politik dakwah yang terkandung dalam pidato pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks historis, yaitu pidato pengangkatan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, yang dianalisis untuk menemukan nilai, prinsip, dan relevansinya terhadap politik dakwah kontemporer. Penelitian ini memadukan pendekatan historis dan analisis wacana untuk memahami konteks sosial-politik kemunculan pidato serta struktur makna yang terkandung di dalamnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berbentuk teks. Data primer berupa teks pidato pengangkatan Abu Bakar sebagaimana termuat dalam literatur sejarah Islam klasik. Data sekunder meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas komunikasi politik Islam, teori dakwah, etika kepemimpinan, serta analisis retorika dan wacana. Literatur yang digunakan diprioritaskan dari sumber-sumber akademik mutakhir guna memastikan relevansi konseptual dengan dinamika politik kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data ilmiah. Sumber-sumber yang relevan diseleksi berdasarkan kredibilitas, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap kerangka teoritis penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual. Teks pidato dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kepemimpinan, legitimasi, akuntabilitas, serta dimensi dakwah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, temuan tersebut dikaitkan dengan teori komunikasi politik dan dakwah kontemporer untuk menilai tingkat relevansi dan aktualisasinya dalam konteks modern. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pembacaan kritis terhadap literatur yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Bakar dan Awal Pengangkatannya sebagai Khalifah

Abu Bakar dikenal sebagai sahabat Nabi yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, tahun dimana Nabi Muhammad dilahirkan. Akan tetapi, menurut pendapat lain, ia dilahirkan dua tahun lebih dua bulan setelah tahun gajah. Bila berpijak pada pendapat yang kedua ini, berarti Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 M karena tahun gajah terjadi pada tahun 570 M.¹⁰ Dari garis keturunan, Abu Bakar merupakan anak dari Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib al Quraisy at Tamimi.

Berdasarkan silsilah tersebut, terlihat relasi keturunan Abu Bakar dan Rasulullah bertemu pada kakek keenam yakni Murrah bin Ka'ab.¹¹ Dengan demikian, sebagaimana Nabi Muhammad, Abu Bakar juga berasal dari suku Quraisy. Suku yang terhormat, baik masa sebelum Islam maupun sesudahnya. Dalam konteks ini, Abu Bakar sangat berpegang kepada sabda Nabi bahwa kekhilafahan mesti ada ditangan Quraisy.

¹⁰ Tiara Novita Sari dan Yudi Pratama, "Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama," *Danadyaksa Historica* 2, no. 2 (Januari 2023): 151, <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5671>.

¹¹ Ahmad Yani, "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 33-44.

Dalam sejarah, biografi Abu Bakar digambarkan demikian harum dan mulia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sosoknya sebagai pria dewasa pertama yang menerima dakwah Islam langsung dari Rasulullah. Sebagai orang yang telah mengenal Rasulullah Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar secara spontan menerima Islam tanpa keraguan.¹² Mudah-mudahan bagi Abu Bakar dalam menerima Islam disebabkan karena sebelumnya ia seorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam terutama terkait dengan kenabian. Disamping itu, beliau memiliki hubungan atau relasi yang sangat dekat dengan Rasulullah. Keduanya saling memahami karakter dan kebaikan masing-masing.

Kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dimulai ketika Nabi Muhammad saw. wafat pada tahun 632 M di Madinah setelah memimpin negara Islam Madinah sekitar 10 tahun (622-632 M).¹³ Praktis, saat itu, umat Islam menghadapi kekosongan kepemimpinan. Pada saat yang sama para sahabat sangat menyadari urgensi kepemimpinan Islam ini sehingga mereka bersegera mencari solusi syar'i atas apa yang menimpa daulah Islam itu.

Para sahabat menganggap kondisi ini (kosongnya kepemimpinan) sebagai tantangan besar yang dihadapi umat Islam. Mereka berpandangan bahwa kepemimpinan sangat penting untuk segera diisi dalam rangka menjaga persatuan umat dan melangsungkan dakwah Islam. Pandangan yang didasarkan paradigma syar'i, bukan hawa nafsu.

Secara mikro, para sahabat faham bahwa setiap perkumpulan mesti ada pemimpinnya, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun.¹⁴ Sabda Rasulullah saw.:

¹² Afzal Iqbal dan Samson Rahman, *Diplomasi Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 125

¹³ Maskur Maskur dan Abdi Fauji Hadiono, "Dakwah Islam Pasca Wafatnya Nabi Muhammad Saw," *JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 3, no. 2 (Agustus 2023): 111–30, <https://doi.org/10.30739/jkaka.v3i2.2435>.

¹⁴ Muh Khoirul Rifa'i, *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Konsep Dasar dan Teori Memimpin Lembaga Pendidikan Islam* (Garudhawaca, 2023), h. 13

إِذَا حَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ¹⁵

Artinya:

"Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin." (HR. Abu Dawud).

Logikanya, bila dalam perkumpulan kecil saja harus ada pemimpinnya, bagaimana dengan komunitas besar yang persoalannya jauh lebih kompleks dan menyangkut eksistensi ajaran Islam? Tentu, kepemimpinan model ini lebih wajib lagi untuk diwujudkan.

Kepemimpinan adalah penentu baik buruknya masyarakat, sejahtera atau tidak, beradab atau tidak dan sebagainya.¹⁶ Karena itu, maka para sahabat sangat mementingkan pemilihan pemimpin yang akan mengurus urusan kaum muslimin sehingga menomorduakan pemakaman jenazah Rasulullah saw. Beberapa tokoh Muhajirin dan Ansor justru berkumpul di Balai Bani Sa'idah Kota Madinah untuk bermusyawarah tentang siapa yang layak menjadi pemimpin politik pengganti Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan sebelum wafat Nabi memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai kepala negara.

Musyawarah berjalan cukup alot karena masing-masing merasa paling berhak menduduki kursi kepemimpinan. Maka muncullah tokoh paling senior dalam Islam dengan segala keutamaan yang dipujikan Rasulullah kepadanya. Tokoh itu adalah Abu Bakar dengan berbagai gelar yang diberikan kepadanya yang menunjukkan kualitasnya sebagai sahabat dan muslim yang taat.

Secara pribadi, Abu Bakar sebenarnya tidak memiliki ambisi untuk jabatan khalifah. Namun demikian, dia memiliki pandangan-pandangan tentang kekhalifahan yang kemudian diadopsi oleh para ulama sebagai hukum syara' yang menunjukkan kapastitasnya sebagai calon kuat khalifah. Pandangan itu, sebagaimana dikutip oleh

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol 2, No 2241 (Maktabah Syamilah, t.t.).

¹⁶ Ali Abdullah, *Khotbah-Khotbah Terakhir Rasulullah* (Bentang Pustaka, 2016), h. 70

Ashalabi adalah urusan kekhilafahan mesti ditangan Quraisy.¹⁷ Sebuah paradigma yang sekilas sangat sukuisme karena Abu Bakar berasal dari Quraisy.

Namun, bila ditelusuri pendapat tersebut adalah ajaran Islam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah :

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ¹⁸

Artinya:

“Kepemimpinan (kekhilafahan) itu pada suku Quraisy.” (HR Ahmad).

Sekalipun prinsip ini adalah ajaran Islam namun perlu disosialisasikan secara bijak mengingat jabatan khalifah seperti madu yang mengundang banyak semut. Bila hal ini tidak dijelaskan maka potensi konflik yang dapat merugikan seluruh komponen umat Islam akan sangat besar.

Karena itu, agar tidak menyinggung kaum Anshor yang bukan dari Quraisy, Abu Bakar melunakan hati kaum Anshor dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi. Namun, kelebihan kaum Anshor yang demikian besar itu bukan berarti mereka lebih berhak akan kekhilafahan. Sembari mengutip hadits Nabi saw, Abu Bakar menegaskan bahwa kaum muhajirin dari kaum Quraisy lebih diutamakan dalam masalah kekhilafahan.¹⁹

Dengan mengutip ayat al-Qur’an, Abu Bakar menyatakan kepada kaum Anshor bahwa kaum muhajirin dinyatakan sebagai orang-orang yang benar.²⁰ Sedangkan orang-orang Anshor disebut sebagai orang yang beruntung. Karena keimanannya yang kuat penjelasan Abu Bakar tidak perlu waktu lama untuk diterima

¹⁷Icol Dianto, “Kepemimpinan Komunitas: Studi Pemahaman Hadis Kepemimpinan di Tangan Bani Quraisy,” *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (Januari 2020): 14–29, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v2i1.1923>.

¹⁸ Ahmad b Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad ... Abī ‘Abdallāh Ahmad b. Muḥam-Ibn Hanbal* (al-Maimūnīya, 1895).

¹⁹Alī Muḥammad aṣ-Ṣallābī, *Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq: Syakhṣīyyatuhu wa ‘Aṣruhu* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2002).

²⁰ Yudi Asmara Harianto, “Kredibilitas Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Meredam Perpecahan Umat Islam pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah,” *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 1 (Juni 2023): 69–88, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i1.253>.

oleh kaum Anshor apalagi menuduh Abu Bakar melakukan politisasi agama ayat. Mereka dengan lapang dada menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Sehingga dengan semangat ukhuwah sahabat muhajirin dan anshor, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasul yang telah berpulang.

Pilihan para sahabat terhadap Abu Bakar, menurut Imam Ghazali, tidak dapat dilepaskan dari pengamatan para sahabat terhadap Abu Bakar ketika mendampingi Nabi saw. Ketika kebersamaian Nabi, Abu Bakar kerap diminta untuk menggantikan imam shalat ketika Nabi saw tengah berhalangan. Atas dasar itu, para sahabat melihat peristiwa itu sebagai isyarat kepemimpinan. Para sahabat berkata : kami memandang bahwa shalat adalah tiang agama. Oleh sebab itu, untuk urusan dunia kami pun memilih pemimpin yang direstui oleh Rasulullah saw untuk urusan agama kami. Dan para sahabat sebelumnya sempat mempertimbangkan Bilal namun mereka tidak memilih Bilal lantaran Rasulullah merestuininya hanya sebagai muadzin bukan sebagai imam.²¹

Abu Bakar secara resmi menjabat sebagai khalifah kaum muslimin pada tahun 632 M, tahun wafatnya Rasulullah. Para sahabat besar dan tokoh-tokoh kaum muslimin satu persatu memberikan bai'at atau janji setia untuk mentaati kepemimpinan Abu Bakar.

Dalam konteks politik dakwah, bai'at yang benar adalah sebagaimana yang dipraktikkan para sahabat dalam memilih pemimpin.²² Perkara ini adalah sunah yang hukumnya wajib dalam memilih pemimpin. Karena itu, setelah secara resmi menerima amanah kepemimpinan Abu Bakar berdiri dihadapan kaum muslimin yang hadir dan memberikan pidato yang sangat terkenal dan tercatat dalam sejarah. Dikutip dari *Tarikh Khulafa*, Abu Bakar berpidato :

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ
أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 2 (Beirut: Darul Ma'rifat, t.t.), h. 79

²² Maranda Sukma Mufatzizah, "Problematika Persoalan Bai'at di Indonesia dalam Konteks Fiqh Siyasa," *Jurnal Darussalam*, 2023, 21–38.

ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخِذَ الْحَقِّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا يَدْعُ قَوْمَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ، وَلَا تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَعْطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ²³.

Artinya:

“Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berlaku baik, maka dukunglah aku, dan jika aku berlaku buruk, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku hingga aku berikan haknya, insya Allah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku hingga aku ambil darinya hak orang lain, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah melainkan Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Dan tidaklah perbuatan maksiat tersebar di suatu kaum melainkan Allah akan menimpakan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan bagi kalian kepadaku.”

Nilai-Nilai Politik Dakwah pada Pidato Khalifah Abu Bakar

Dari pidato singkat yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar, terdapat nilai-nilai yang sangat penting terutama dalam kaitannya dengan politik dakwah. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi kehidupan umat Islam dewasa ini, terutama para pemimpin diseluruh negeri, termasuk Indonesia.

Pertama, nilai tanggung jawab dan sifat tawadhu. Abu Bakar mengawali pidatonya dengan kalimat: “*Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusan kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian.* Kalimat ini mengandung pesan bahwa pemimpin diangkat dengan tugas yang berat yaitu mengurus urusan masyarakat, baik pada sektor religiusitas, pendidikan, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Secara substantif, pidato Abu Bakar tersebut selaras dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya, “*Ketahuiilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang*

²³Aal-Suyūfī, *Tarikh al-khulafa'*, [Tab. 3] (Al-Qāhīrah: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1964).

*memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya... (HR Bukhari).*²⁴

Adapun nilai ketawadhuan pada pidato Abu Bakar terbaca dari kalimat : *padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian.*²⁵ Secara eksplisit, kalimat ini mengandung nilai bahwa sekalipun Abu Bakar telah sampai pada puncak kekuasaan tertinggi namun pencapaian itu tidak memunculkan sikap sombong dan kebanggaan sama sekali.

Bagi Abu Bakar, amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab dan akan berubah menjadi kehinaan apabila tidak menjalankannya dengan baik. Sterilnya Abu Bakar dari sifat sombong telah dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadits tentang isbal. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bersabda Rasulullah saw.:

‘Barangsiapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat Allah tidak berkenan melihat kepadanya. Lalu berkata Abu Bakar : sesungguhnya pakaianku menjuntai seringkali menjuntai dengan sendirinya ketika saya biarkan dan lupa untuk memegangnya. Lalu Rasulullah bersabda : sesungguhnya kamu lakukan ini bukan karena motif sombong.’²⁶

Dalam konteks kepemimpinan, kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemimpin dan menjauhi kesombongan, penting dimiliki oleh setiap muslim terlebih mereka yang duduk dikursi kepemimpinan. Sombong didefinisikan oleh Nabi saw sebagai: *menolak kebenaran dan merendahkan manusia.*²⁷ Berdasarkan definisi tersebut maka pemimpin yang menolak kebenaran Islam sebagai hukum bahkan menuduh syariat Allah tidak relevan untuk kehidupan saat ini maka masuk kategori sombong yang diancam dengan adzab yang pedih di akhirat.

²⁴Roby Alfaen, “Tanggung jawab dalam kepemimpinan,” preprint, Open Science Framework, 25 November 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/r5pkm>.

²⁵ Muhammad Ainul Yaqin, “Telaah Ayat-Ayat Tentang Abū Bakar Ash-Shiddīq dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Al-Misbah,” *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (September 2020): 60, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v4i1.63>.

²⁶ Alī Muḥammad aṣ-Ṣallābī, *Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq: Syakhṣiyyatuhu wa ‘Aṣruhu*.

²⁷ Asmaul Husna dkk., “Perilaku Sombong Dalam Masyarakat Desa Langgomali Kec. Wolo, Kab. Kolaka (Perspektif QS Luqman/31:18),” *El-Maqra’: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi* 3, no. 1 (Juni 2023): 52, <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v3i1.6277>.

Kaitannya dengan Indonesia, prinsip tanggung jawab kepemimpinan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam realitas saat ini, di mana krisis kepemimpinan sering kali berakar pada lemahnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan kekuasaan. Banyak praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat menunjukkan bahwa kepemimpinan sering dipahami sebagai hak, bukan amanah. Dalam perspektif politik dakwah, tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana dicontohkan Abu Bakar menuntut adanya integritas, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan publik.

Kedua, terbuka terhadap kritik dan masukan. Nilai keterbukaan Abu Bakar terhadap kritik terindikasi melalui perkataannya: *Jika aku berlaku baik, maka dukunglah aku, dan jika aku berlaku buruk, maka luruskanlah aku*. Kalimat ini mengkonfirmasi sifat tawadhu Abu Bakar yang tidak memandang dirinya sempurna sehingga memaksakan setiap apa yang menjadi kebijakannya. Beliau menerima masukan bila dianggap lebih sesuai dengan hukum Allah demi kemaslahatan rakyat.

Selama memerintah, Abu Bakar mengedepankan sikap musyawarah dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting sebagaimana ketika menghadapi gelombang kemurtadan (Perang Riddah). Pada masa itu, meskipun sebagian sahabat awalnya ragu untuk memerangi kelompok yang menolak membayar zakat, Abu Bakar tetap mengajak para sahabat bermusyawarah sebelum akhirnya menegaskan kebijakan berdasarkan pertimbangan syariat dan kemaslahatan umat.²⁸

Contoh lain adalah keputusan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an atas usulan Umar bin Khattab. Kondisi ini terjadi setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam perang Yamamah.²⁹ Pada awalnya, usulan untuk mengumpulkan Al-Qur'an tidak disetujui Abu Bakar namun beliau tidak langsung memutuskan sendiri, melainkan mendiskusikannya terlebih dahulu. Pada akhirnya argumen Umar

²⁸ Harja Saputra, "Rekonsiliasi Pascasukses Kepemimpinan: Berkaca pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama dalam Islam dan Implementasinya pada Kehidupan Demokrasi Indonesia," *MAARIF* 14, no. 1 (Juni 2019): 102–13, <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.51>.

²⁹ Inayatul Aisye dan Indah Suci, "Jam'ul Qur'an Masa Khulafa Alrasyidin dan Setelah Khulafa Al rasyidin," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 1 (Februari 2022): 112–23, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.25>.

bin Khatab mampu meyakinkan beliau bahwa langkah tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga otentisitas wahyu.

Bahkan, tatkala mendapatkan kritik, Abu Bakar tidak responsif tapi terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan serius. Bila kritik tersebut baik dan sesuai dengan hukum syara' maka beliau tidak ragu untuk menerima dan mengamalkan pendapat si pengkritik. Namun bila dirasa sebaliknya maka beliau tetap menjalankan kebijakannya sembari tetap memberikan penghargaan pada pihak yang mengkritik. Sebagai manusia, Abu Bakar sangat menyadari potensi dirinya untuk berbuat salah. Karena itu, kritik bisa menjadi warning bagi khalifah agar tidak terlalu jauh terjerumus dalam kesalahan.

Kritik dalam konsep *siyasah Islam* merupakan ajaran yang sangat penting. Apalagi potensi pemimpin melakukan penyimpangan sangatlah besar. Karena itu, Allah membatasi perintah mentaati pemimpin sebatas mereka mentaati Allah dengan menerapkan syariat Allah.³⁰ Rakyat wajib mentaati penguasanya sepanjang tidak menyalahi syariat Allah.

Dalam konteks Indonesia, meskipun secara formal ruang kritik dijamin dalam sistem demokrasi, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya resistensi terhadap kritik, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, hingga delegitimasi suara oposisi. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, menghidupkan kembali semangat kepemimpinan ala Abu Bakar yang terbuka terhadap kritik dan masukan menjadi sangat relevan sebagai landasan politik dakwah, agar kekuasaan tetap sejalan dengan Islam.

Ketiga, mengobarkan jihad. Sekalipun Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang sangat lembut dan mudah menangis. Namun, dalam memimpin kelembutan tidak

³⁰ Michelle Salma Khotom Aji, Unsa Elen Purwanti, dan Khamim Khamim, "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (Juni 2024): 71–86, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.

menutupi ketegasan beliau dalam menegakkan Islam di tengah kehidupan manusia.³¹

Ketegasan ini tergambar dalam kalimat pidatonya :

Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah melainkan Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Dan tidaklah perbuatan maksiat tersebar di suatu kaum melainkan Allah akan menimpakan bencana kepada mereka.³²

Tidak ada yang meragukan jihad Abu Bakar dalam menegakan Islam, baik semasa dengan Nabi maupun saat beliau menjadi khalifah. Bahkan, saat pertama kali menerima amanah menjadi khalifah, langkah utama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah jihad membasmi kelompok murtadin penolak zakat dan melakukan ekspedisi ke luar negeri.³³

Terkait ekspedisi jihad-nya ke Syam, Abu Bakar berpesan kepada panglima perang yang saat itu dijabat oleh Yazid bin Abi Sofyan :

Wahai Yazid, sesungguhnya engkau akan menemui suatu kaum yang mengira bahwa mereka akan mengurung diri karena Allah. Berilah peringatan atas yang mereka lakukan. Aku wasiatkan kepada mu atas sepuluh perkara : jangan sampai engkau membunuh perempuan, membunuh anak kecil, membunuh orang lanjut usia, jangan membunuh domba atau sapi kecuali untuk dimakan (dagingnya), jangan membakar pohon kurma dan menggelemakannya, jangan berlebihan dan jangan menjadi pengecut.³⁴

Jihad yang dilakukan Abu Bakar memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia saat ini. Dengan contoh kebijakan yang dilakukan, Abu Bakar memaknai jihad sebagai kesungguhan dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam dan melawan penyimpangan yang mengancam tatanan sosial, baik melalui peperangan maupun kesungguhan menegakkan agama. Dalam konteks Indonesia, semangat jihad ini dapat

³¹ Najwa Hanim M.R dkk., "A review on anticipatory grief and lessons learnt from the history of Abu Bakr r.a.," *IJUM Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (Oktober 2018), <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i2.935>.

³² Dwi Hartini, "Kontekstualisasi makna jihad di era milenial," *Dialogia* 17, no. 1 (2019): 81–100.

³³ Muhammad Dahlan, "Kontribusi Abu Bakar Terhadap Perkembangan Islam," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (Januari 2018): 126–36, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.

³⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

diwujudkan dalam bentuk komitmen kolektif untuk melawan korupsi, ketidakadilan, disinformasi, serta praktik sosial yang merusak moral masyarakat. Politik dakwah, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen jihad yang mendorong transformasi sosial melalui penegakan amar ma'ruf nahi munkar.

Keempat, menjaga keshalehan sosial. Abu Bakar memahami betul bahwa Islam bukan agama sekuler sebagaimana difahami oleh sebagian kaum muslimin dewasa ini. Kesalehan yang menjadi titik kewajiban Islam bukan saja terkait hubungan dengan Allah saja seperti sholat, puasa, haji maupun dzikir-dzikir. Betul bahwa semua itu merupakan ajaran Islam yang sangat penting. Akan tetapi, keshalehan tidak diukur sebatas parameter-parameter religiusitas tersebut. Lebih dari itu, Islam mengatur bentuk kesalehan lain yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menjaga keshalehan sosial, Abu Bakar mengingatkan agar sesama kaum muslimin bahkan sesama umat manusia untuk saling menjaga diri dari kemaksiatan, baik yang dilakukan secara individu dan terlebih bila dilakukan secara bersama-sama. Tanpa ada upaya untuk mencegah, mengingatkan atau mengingkari perbuatan tersebut. Dalam kaitan ini, Abu Bakar berpesan dalam pidatonya : *'Dan tidaklah perbuatan maksiat tersebar di suatu kaum melainkan Allah akan menimpakan bencana kepada mereka.'*

Secara implisit, melalui pidatonya ini, Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi terwujudnya kesalehan sosial. Abu Bakar tidak menginginkan masyarakatnya hanya memiliki kesalehan individual namun mengabaikan kesalehan sosial. Menurut Helmiati, disebut kesalehan individual sebab hanya mengutamakan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Allah tanpa ada relasi dengan dengan kepentingan sosial.³⁵ Akibatnya, muncul pribadi yang secara personal sangat rajin sholat berjamaah, baca al-Qur'an dan wirid namun pada saat yang sama memiliki lidah yang gemar menyakiti tetangga, tidak peduli dengan nasib orang-orang lemah sekalipun dikaruniai kemampuan.

³⁵Helmiati, *Kesalehan Individu dan Kesalehan Sosial*, dalam <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2015/08/19>

Abu Bakar tidak menghendaki kondisi tersebut terjadi pada masyarakat Islam yang dia pimpin. Karena itu, Abu Bakar mengingatkan agar sesama warga masyarakat, muslim dan kafir agar saling menjaga dari bentuk kemaksiatan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan hadits Nabi saw dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda :

36 مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’ (HR. Muslim).

Mengomentari hadits ini, Imam Ghazali mengklasifikasikan tugas mencegah kemungkaran bagi seluruh komponen umat Islam, dari rakyat hingga pejabat. Beliau berkata : mengubah dengan tangan adalah bagi penguasa, mengubah dengan lidah/perkataan adalah bagi ulama dan mengubah dengan hati adalah untuk orang-orang awam.³⁷

Relevansi pemikiran ini menjadi sangat signifikan dalam konteks politik dakwah di Indonesia. Di satu sisi, terdapat kecenderungan pemisahan antara agama dan politik yang berimplikasi pada melemahnya peran nilai-nilai Islam dalam mengarahkan kebijakan publik. Di sisi lain, terdapat pula praktik politisasi agama yang justru mereduksi dakwah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam situasi tersebut, pidato Abu Bakar menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan politik sebagai medium dakwah yang berorientasi pada pemeliharaan keshalehan sosial, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Kelima, mentaati pemimpin karena ketataannya kepada Allah. Pesan terakhir Abu Bakar dalam pidatonya adalah perintah untuk mentaati dirinya sebagai pemimpin kaum muslimin. Beliau berpidato : ‘*Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan*

³⁶ Imam Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, t.t.).

³⁷ Imam Ghazali, “Mukasyafatul Qulub,” preprint, Jakarta: Terbit Terang, 1990., h. 89

Rasul-Nya. Namun, jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan bagi kalian kepadaku.”

Dalam konsepsi Islam, seorang pemimpin memiliki hak untuk ditaati. Suatu hak yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Prinsip ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa pemimpin memiliki tugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mewujudkan kemaslahatan publik. Berkaitan hal ini, Imam Mawardi sebagaimana dikutip oleh As Sirjani bahwa kepemimpinan atau khilafah identik sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan dunia. Perkara kepemimpinan ini harus tegak berdasarkan syariat, bukan logika.³⁸ Karena pemimpin dalam Islam mendapatkan legalitas syara' maka mentaati juga sebuah kewajiban. Itulah yang ditekankan oleh Abu Bakar dalam pidatonya.

Dengan demikian, siapa yang menghendaki titahnya dipatuhi oleh umat Islam maka seyogyanya seorang pemimpin dipilih dengan metode Islam dan dalam rangka menjalankan Islam secara keseluruhan. Kaitannya dengan Indonesia, prinsip ini harus menjadi landasan ideologis bagi masyarakat untuk taat kepada pemerintah selama kebijakan yang dijalankan selaras dengan ajaran Islam dan kemaslahatan umum. Pada saat yang sama memberikan ruang bagi kritik konstruktif ketika terjadi penyimpangan, baik personal maupun struktural.

Oleh sebab itu, politik dakwah di Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan ideologis yang menyeimbangkan antara stabilitas sosial dan kontrol etis terhadap kekuasaan, sehingga tujuan kepemimpinan Islam dapat terwujud dalam praktik kehidupan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, tampak bahwa kepribadian Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan representasi ideal dari pemimpin Islam. Kepemimpinan Abu Bakar memadukan Islam aspek spiritual, moral, dan sosial-politik. Abu Bakar memiliki integritas tinggi, keteguhan iman, kerendahan hati, serta komitmen kuat

³⁸Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), h. 462

terhadap kebenaran. Karakter tersebut terbentuk melalui kedekatannya dengan Nabi Muhammad dan pengalaman panjang dalam mendampingi dakwah Islam sejak fase awal. Kepribadiannya yang stabil dan terpercaya menjadikannya figur yang memiliki legitimasi moral yang kuat di tengah umat.

Proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama pasca wafatnya Nabi menunjukkan dinamika politik umat Islam yang berlangsung secara deliberatif dan komunikatif. Peristiwa di Saqifah mencerminkan adanya musyawarah di antara kaum Muhajirin dan Anshar, yang pada akhirnya menghasilkan konsensus atas kepemimpinan Abu Bakar. Legitimasi tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berbasis pada rekam jejak, kedekatan dengan Nabi, serta penerimaan luas dari para sahabat.

Adapun pidato pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah mengandung nilai-nilai etika dan komunikasi politik dakwah yang sangat mendalam. Dalam pidatonya, Abu Bakar menampilkan sikap rendah hati dengan menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik di antara kaum Muslimin, sekaligus menegaskan prinsip akuntabilitas publik dengan meminta koreksi jika ia menyimpang. Ia juga menekankan supremasi hukum Allah dan Rasul sebagai dasar kepemimpinan, serta menetapkan prinsip ketaatan yang bersyarat—yakni selama pemimpin berada dalam koridor kebenaran. Gaya komunikasinya bersifat lugas, jujur, persuasif, dan berorientasi pada nilai-nilai moral, sehingga mencerminkan model komunikasi politik dakwah yang etis dan transformatif.

Kepemimpinan Abu Bakar penting menjadi rujukan normatif dalam membangun etika kepemimpinan dan komunikasi dakwah kontemporer. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan terhadap kritik, serta komitmen terhadap kebenaran merupakan prinsip-prinsip universal yang relevan untuk diterapkan dalam praktik kepemimpinan modern, khususnya dalam konteks dakwah dan kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ali. *Khotbah-Khotbah Terakhir Rasulullah*. Benteng Pustaka, 2016.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Vol 2. No 2241. Maktabah Syamilah, t.t.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Juz 2. Beirut: Darul Ma'rifat, t.t.

Aisye, Inayatul, dan Indah Suci. "Jam'ul Qur'an Masa Khulafa Alrasyidin Dan Setelah Khulafa Alrasyidin." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 1 (Februari 2022): 112–23. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.25>.

Aji, Michelle Salma Khotom, Unsa Elen Purwanti, dan Khamim Khamim. "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (Juni 2024): 71–86. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.

Alfaen, Roby. "Tanggung jawab dalam kepemimpinan." Preprint, Open Science Framework, 25 November 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r5pkm>.

Alī Muḥammad aṣ-Ṣallābī. *Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq: Syakhṣiyyatuhu wa 'Aṣruhu*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.

al-Suyūṭī. *Tarikh al-khulafa'*. [Tab. 3]. Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1964.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.

As-Sirjani, Raghīb. *Sumbangan peradaban Islam pada dunia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.

Astuti, Puji. *Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia*. 2013.

Azizah, Siti Nur, dan Ari Wirasusanto. "Leadership dalam Perspektif Dakwah." *Istisyfa: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 3, no. 3 (Desember 2024). <https://doi.org/10.29300/istisyfa.v3i3.6366>.

Dahlan, Muhammad. "Kontribusi Abu Bakar Terhadap Perkembangan Islam." *ihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (Januari 2018): 126–36. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4166>.

Dianto, Icol. "Kepemimpinan Komunitas: Studi Pemahaman Hadis Kepemimpinan di Tangan Bani Quraisy." *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (Januari 2020): 14–29. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v2i1.1923>.

Ghazali, Imam. "Mukasyafatul Qulub." Preprint, Jakarta: Terbit Terang, 1990.

Habibi, Bimby, Patmawati,. “Strategi Dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq.” *J-MD Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (Juni 2023): 27–44. <https://doi.org/10.24260/j-md.v4i1.1514>.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad Ibn. *Musnad ... Abi 'Abdallah Ahmad b. Muham-Ibn Hanbal*. Al-Maimūniya, 1895.

Harianto, Yudi Asmara. “Kredibilitas Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Meredam Perpecahan Umat Islam pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah.” *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 1 (Juni 2023): 69–88. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i1.253>.

Hartini, Dwi. “Kontekstualisasi makna jihad di era milenial.” *Dialogia* 17, no. 1 (2019): 81–100.

Husna, Asmaul, Fatirawahidah Fatirawahidah, Syamsu Syamsu, dan Muhammad Hasdin Has. “Perilaku Sombong Dalam Masyarakat Desa Langgomali Kec. Wolo, Kab. Kolaka (Perspektif QS Luqman/31:18).” *El-Maqra': Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi* 3, no. 1 (Juni 2023): 52. <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v3i1.6277>.

Imam Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, t.t.

Iqbal, Afzal, dan Samson Rahman. *Diplomasi Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Khadijah, Siti, dan Jasmin Juwandari Putri. “Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab.” *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025): 13–30.

Maimunah, Maimunah. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya.” *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* 5, no. 1 (2017).

Maskur, Maskur dan Abdi Fauji Hadiono. “Dakwah Islam Pasca Wafatnya Nabi Muhammad Saw.” *JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 3, no. 2 (Agustus 2023): 111–30. <https://doi.org/10.30739/jkaka.v3i2.2435>.

M.R, Najwa Hanim, Jefri Irwan H, Muhammad Al Siddiq S.M, Nor Jannah N, Zul Azlin R, dan Md Faiz M.T. “A review on anticipatory grief and lessons learnt from the history of Abu Bakr r.a.” *IJUM Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (Oktober 2018). <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i2.935>.

Mufatzizah, Maranda Sukma. “Problematika Persoalan Bai'at di Indonesia dalam Konteks Fiqh Siyasa.” *Jurnal Darussalam*, 2023, 21–38.

Muhammad Taufiqul Hidayat, Zhalfa Luthfi Fauza, dan Bahaking Rama. “Proses Peralihan Kepemimpinan Dari Nabi Ke Khalifa Abu Bakar As-Siddiq.” *ULIL*

ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 4, no. 1 (Desember 2024): 162–68.
<https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6397>.

Mulawarman, Mulawarman. “Pidato Pertama Abu Bakar Di Depan Kaum Anshar (Studi Analisis Retorika dan Gaya Bahasa).” *BIDAR: Jurnal Ilmiah Kebahasan & Kesastraan* 10, no. 2 (2020): 27–36.

Rifa’i, Muh Khoirul. *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Konsep Dasar dan Teori Memimpin Lembaga Pendidikan Islam*. Garudhawaca, 2023.

Saputra, Harja. “Rekonsiliasi Pascasukses Kepemimpinan: Berkaca pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama dalam Islam dan Implementasinya pada Kehidupan Demokrasi Indonesia.” *MAARIF* 14, no. 1 (Juni 2019): 102–13.
<https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.51>.

Sari, Tiara Novita, dan Yudi Pratama. “Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama.” *Danadyaksa Historica* 2, no. 2 (Januari 2023): 151. <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5671>.

Siri, Hasnani. “Abu Bakar: Fungsi kekhalifahan dan kebijaksanaannya memerangi kaum murtad.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 170–83.

Syahidatul Fatikhah, Friska. “Komunikasi Persuasi Dakwah dalam Pidato Abu Bakar pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah.” *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Januari 2024): 1–22.
<https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.19>.

Yani, Ahmad. “Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq.” *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 33–44.

Yaqin, Muhammad Ainul. “Telaah Ayat-Ayat Tentang Abû Bakar Ash-Shiddîq dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Al-Misbah.” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (September 2020): 60.
<https://doi.org/10.58438/alkarima.v4i1.63>.